



SALINAN

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

Pasal 1

- (1) Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Kelas Jabatan Pelaksana di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Kelas Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mulai berlaku sejak pertama kali ditetapkan secara definitif pejabat yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2019

PLT. KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HARIYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1363

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Surahno

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA

KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

No	Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
1	Sekretaris Utama	17
2	Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama	15
3	Direktur Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	15
4	Direktur Pembudayaan	15
5	Direktur Analisis dan Sinkronisasi	15
6	Direktur Advokasi	15
7	Direktur Pelembagaan dan Rekomendasi	15
8	Direktur Pengkajian Materi	15
9	Direktur Standarisasi Materi dan Metode Aparatur Negara	15
10	Direktur Standarisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal, dan Informal	15
11	Direktur Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan	15
12	Direktur Standarisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	15
13	Direktur Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	15
14	Direktur Pengendalian	15
15	Direktur Evaluasi	15
16	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	15
17	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	15
18	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	15
19	Kepala Biro Fasilitasi Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian	15
20	Kepala Biro Pengawasan Internal	15
21	Kepala Pusat Data dan Informasi	15
22	Kepala Subdirektorat Hubungan Antar Kementrian/Lembaga	12

No	Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
23	Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Organisasi Sosial Politik	12
24	Kepala Subdirektorat Kerja Sama	12
25	Kepala Subdirektorat Sosialisasi	12
26	Kepala Subdirektorat Pengembangan Komunikasi	12
27	Kepala Subdirektorat Pengembangan Jaringan	12
28	Kepala Subdirektorat Pemantapan Pranata	12
29	Kepala Subdirektorat Inovasi Pembudayaan	12
30	Kepala Subdirektorat Analisis dan Sinkronisasi I	12
31	Kepala Subdirektorat Analisis dan Sinkronisasi II	12
32	Kepala Subdirektorat Analisis dan Sinkronisasi III	12
33	Kepala Subdirektorat Preventif	12
34	Kepala Subdirektorat Pendampingan	12
35	Kepala Subdirektorat Apresiasi	12
36	Kepala Subdirektorat Pelembagaan dan Rekomendasi I	12
37	Kepala Subdirektorat Pelembagaan dan Rekomendasi II	12
38	Kepala Subdirektorat Pelembagaan dan Rekomendasi III	12
39	Kepala Subdirektorat Kajian Filosofis dan Historis	12
40	Kepala Subdirektorat Kajian Kebijakan dan Yuridis	12
41	Kepala Subdirektorat Kajian Keilmuan	12
42	Kepala Subdirektorat Standarisasi Materi dan Metode Pejabat Negara	12
43	Kepala Subdirektorat Standarisasi Materi dan Metode Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	12
44	Kepala Subdirektorat Standarisasi Materi dan Metode Aparatur Sipil Negara	12
45	Kepala Subdirektorat Standarisasi Materi dan Metode Formal	12
46	Kepala Subdirektorat Standarisasi Materi dan Metode Nonformal	12
47	Kepala Subdirektorat Standarisasi Materi dan Metode Informal	12
48	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan I	12
49	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan II	12
50	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan III	12

No	Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
51	Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan I	12
52	Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan II	12
53	Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan III	12
54	Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara	12
55	Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Formal	12
56	Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Nonformal dan Informal	12
57	Kepala Subdirektorat Pengendalian I	12
58	Kepala Subdirektorat Pengendalian II	12
59	Kepala Subdirektorat Pengendalian III	12
60	Kepala Subdirektorat Evaluasi I	12
61	Kepala Subdirektorat Evaluasi II	12
62	Kepala Subdirektorat Evaluasi III	12
63	Kepala Bagian Perencanaan	12
64	Kepala Bagian Keuangan	12
65	Kepala Bagian Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja	12
66	Kepala Bagian Penyusunan Hukum	12
67	Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	12
68	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	12
69	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan	12
70	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	12
71	Kepala Bagian Rumah Tangga, Arsip, dan Tata Usaha Pimpinan	12
72	Kepala Bagian Fasilitasi Dewan Pengarah	12
73	Kepala Bagian Fasilitasi Ketenagaahlian	12
74	Kepala Bagian Pengawasan Kinerja	12
75	Kepala Bagian Pengawasan Keuangan	12
76	Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi	12
77	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	12
78	Kepala Subbagian Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Tahunan	9
79	Kepala Subbagian Penganggaran	9

No	Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
80	Kepala Subbagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan	9
81	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	9
82	Kepala Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis	9
83	Kepala Subbagian Akuntabilitas Kinerja	9
84	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
85	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan	9
86	Kepala Subbagian Produk Hukum Lainnya	9
87	Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum	9
88	Kepala Subbagian Informasi Hukum	9
89	Kepala Subbagian Organisasi	9
90	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	9
91	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
92	Kepala Subbagian Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Barang Milik Negara	9
93	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan	9
94	Kepala Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia	9
95	Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia	9
96	Kepala Subbagian Layanan Kerumahtanggaan	9
97	Kepala Subbagian Persuratan, Kearsipan, dan Tata Usaha Biro	9
98	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala	9
99	Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala	9
100	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama	9
101	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy I	9
102	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy II	9
103	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy III	9
104	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy IV	9
105	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy V	9
106	Kepala Subbagian Protokol Dewan Pengarah	9
107	Kepala Subbagian Tata Usaha Dewan Pengarah	9
108	Kepala Subbagian Tata Usaha I	9
109	Kepala Subbagian Tata Usaha II	9
110	Kepala Subbagian Pengawasan Perencanaan Kinerja	9
111	Kepala Subbagian Evaluasi Kinerja	9
112	Kepala Subbagian Tata Usaha	9

No	Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
113	Kepala Subbagian Pelaksanaan Pengawasan	9
114	Kepala Subbagian Pendampingan	9
115	Kepala Subbagian Tata Usaha	9

PLT. KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HARIYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA

KELAS JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

No	Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
1	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur Subbagian Akuntabilitas Kinerja	7
2	Analisis Diklat Subdirektorat Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan I	7
3	Analisis Diklat Subdirektorat Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan II	7
4	Analisis Diklat Subdirektorat Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan III	7
5	Analisis Hukum Subdirektorat Kajian Kebijakan dan Yuridis	7
6	Analisis Hukum Subbagian Produk Hukum Lainnya	7
7	Analisis Hukum Subdirektorat Preventif	7
8	Analisis Kelembagaan Subbagian Organisasi	7
9	Analisis Kelembagaan Subdirektorat Pemantapan Pranata	7
10	Analisis Kerja Sama Subdirektorat Hubungan Antar Kementerian/Lembaga	7
11	Analisis Kerja Sama Subdirektorat Kerja Sama	7
12	Analisis Kerja Sama Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	7
13	Analisis Laporan Keuangan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	7
14	Analisis Legislasi Subbagian Informasi Hukum	7
15	Analisis Pelayanan Subbagian Protokol Dewan Pengarah	7
16	Analisis Pendidikan Subdirektorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan I	7
17	Analisis Pendidikan Subdirektorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan II	7
18	Analisis Pendidikan Subdirektorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan III	7

No	Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
19	Analisis Pendidikan Subdirektorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara	7
20	Analisis Pendidikan Subdirektorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Formal	7
21	Analisis Pendidikan Subdirektorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Nonformal dan Informal	7
22	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur Subdirektorat Pengendalian I	7
23	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur Subdirektorat Pengendalian II	7
24	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur Subdirektorat Pengendalian III	7
25	Analisis Penelitian dan Pengembangan Subdirektorat Kajian Filosofi dan Historis	7
26	Analisis Pengembangan Kompetensi Subdirektorat Kajian Keilmuan	7
27	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Subbagian Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia	7
28	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Subdirektorat Standardisasi Materi dan Metode Pejabat Negara	7
29	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Subdirektorat Standardisasi Materi dan Metode Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	7
30	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Subdirektorat Standardisasi Materi dan Metode Aparatur Sipil Negara	7
31	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Subdirektorat Standardisasi Materi dan Metode Formal	7
32	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Subdirektorat Standardisasi Materi dan Metode Nonformal	7
33	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Subdirektorat Standardisasi Materi dan Metode Informal	7
34	Analisis Layanan Umum Subbagian Layanan Kerumahtanggaan	7
35	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Subbagian Peraturan Perundang-undangan	7
36	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Subdirektorat Analisis dan Sinkronisasi I	7

No	Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
37	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Subdirektorat Analisis dan Sinkronisasi II	7
38	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Subdirektorat Analisis dan Sinkronisasi III	7
39	Analisis Perbendaharaan Subbagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan	7
40	Analisis Perencanaan Anggaran Subbagian Penganggaran	7
41	Analisis Perencanaan Anggaran Subbagian Pengembangan Sistem dan Pengelolaan BMN	7
42	Analisis Perencanaan Anggaran Subbagian Layanan Pengadaan	7
43	Analisis Perencanaan Subbagian Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Tahunan	7
44	Analisis Perencanaan Subbagian Persuratan, Kearsipan dan Tata Usaha Biro	7
45	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia	7
46	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis	7
47	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Subdirektorat Evaluasi I	7
48	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Subdirektorat Evaluasi II	7
49	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Subdirektorat Evaluasi III	7
50	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Pengawasan Perencanaan Kinerja	7
51	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Evaluasi Kinerja	7
52	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Pelaksanaan Pengawasan	7
53	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Pendampingan	7
54	Analisis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Organisasi Sosial Politik	7
55	Analisis Publikasi Subdirektorat Sosialisasi	7
56	Analisis Publikasi Subdirektorat Pengembangan Komunikasi	7
57	Analisis Publikasi Subdirektorat Pengembangan Jaringan	7
58	Analisis Publikasi Subdirektorat Inovasi Kebudayaan	7

No	Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
59	Analisis Resosialisasi dan Rehabilitasi Subdirektorat Pendampingan	7
60	Analisis Resosialisasi dan Rehabilitasi Subdirektorat Apresiasi	7
61	Analisis Resosialisasi dan Rehabilitasi Subdirektorat Pelembagaan dan Rekomendasi I	7
62	Analisis Resosialisasi dan Rehabilitasi Subdirektorat Pelembagaan dan Rekomendasi II	7
63	Analisis Resosialisasi dan Rehabilitasi Subdirektorat Pelembagaan dan Rekomendasi III	7
64	Pranata Kearsipan Subbagian Dokumentasi Hukum	6
65	Pengelola Data Subbagian Tata Usaha Pusdatin	6
66	Bendahara	7
67	Ajudan	7
68	Pengolah Data	7
69	Sekretaris	7
70	Petugas Protokol	7

PLT. KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HARIYONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA

KELAS JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

No	Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
1	Analisis Kebijakan Utama	14
2	Analisis Kebijakan Madya	12
3	Analisis Kebijakan Muda	10
4	Analisis Kebijakan Pertama	8
5	Analisis Kepegawaian Madya	11
6	Analisis Kepegawaian Muda	9
7	Analisis Kepegawaian Pertama	8
8	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
9	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7
10	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6
11	Arsiparis Utama/Ahli Utama	13
12	Arsiparis Madya/Ahli Madya	11
13	Arsiparis Muda/Ahli Muda	9
14	Arsiparis Pertama/Ahli Pertama	8
15	Arsiparis Penyelia	8
16	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
17	Arsiparis Pelaksana/Terampil	6
18	Auditor Utama	13
19	Auditor Madya	11
20	Auditor Muda	9
21	Auditor Pertama	8
22	Auditor Penyelia	8
23	Auditor Pelaksana Lanjutan	7
24	Auditor Pelaksana	6
25	Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama	15

No	Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
26	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	13
27	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	11
28	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	9
29	Pranata Komputer Utama	13
30	Pranata Komputer Madya	11
31	Pranata Komputer Muda	9
32	Pranata Komputer Pertama	8
33	Pranata Komputer Penyelia	8
34	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7
35	Pranata Komputer Pelaksana	6
36	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Utama	13
37	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Madya	11
38	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Muda	9
39	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pertama	8

PLT. KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HARIYONO